

PT KIMIA FARMA TBK.



Dibuat Oleh:

Azhar Primo Mezara	1810112168
Shinta Aulia Prameswari	2010112046
Simson Hendry Tulak	2010112070
Azzahra Rahmi Nurfadhila	2010112071
Hanna Nabila	2010112072
Farhan Sidiq	2010112075

Tim dosen pengampu:

- Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA.,CGOP
- Lidya Primta Surbakti.,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,Ph.d
 - Dr. Ira Geraldina.,Ak.,CA
- Husnah Nur Laela Ermaya, S.E., M.M., Ak.,CA.,CGP

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM SARJANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

2021

A. Sejarah Perusahaan

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kina Farma. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero) berdasarkan akta notaris Soelaeman Ardjasmita nomor 18 tanggal 16 Agustus 1971. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan KAEF adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi khususnya bidang industri kimia, farmasi, biologi, kesehatan, industri makanan/minuman dan apotik. Saat ini, Kimia Farma telah memproduksi sebanyak 361 jenis obat yang terdiri dari beberapa kategori produk, yaitu obat generik, produk kesehatan konsumen (Over The Counter (OTC), obat herbal dan kosmetik), produk etikal, antiretroviral, narkotika, kontrasepsi, dan bahan baku.

Pada perkembangannya, Kimia Farma menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan (healthcare) terintegrasi di Indonesia. Selain apotek dan klinik, bidang usaha healthcare Kimia Farma didukung oleh kegiatan manufaktur farmasi, riset dan pengembangan, pusat perdagangan dan distribusi, pemasaran, serta ritel farmasi.

Kegiatan Usaha PT Kimia Farma Tbk.

- a. Memproduksi sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika);
- b. Memproduksi alat kesehatan dan bahan kimia;
- c. Memproduksi minyak nabati, yodium dan garam-garamnya;
- d. Memproduksi produk makanan dan minuman;
- e. Memproduksi pengemas dan bahan pengemas;
- f. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, perdagangan dan distribusi dari hasil produksi seperti di atas, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain, baik di dalam maupun di luar

negeri;

g. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan (*healthcare services*);

h. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh industri farmasi, healthcare, kimia, biologi, alat kesehatan, makanan dan minuman sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan.

Prinsip GCG yang Diterapkan Oleh PT Kimia Farma Tbk.

1. Transparency

PT Kimia Farma Tbk. melakukan prinsip transparansi dengan melaporkan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perseroan, kondisi keuangan, dll.

2. Accountability

PT Kimia Farma Tbk. menjalankan akuntabilitas perusahaannya dengan menyajikan annual report untuk didiskusikan bersama.

3. Responsibility

Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawabnya.

4. Independence

Perusahaan memastikan seluruh organ CG tidak mementingkan kepentingan pribadi.

5. Fairness

Perusahaan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingannya.

B. Permasalahan efektivitas CG pada PT Kimia Farma Tbk.

1. Kendala hukum

Corporate governance haruslah menjamin perlakuan yang sama dan perlindungan atas hak-hak semua pemegang saham dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan (abuses) oleh pihak-pihak tertentu. Di Indonesia, pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya hanya mempunyai sedikit celah untuk melindungi diri mereka terhadap tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Dalam sistem hukum kita mekanisme terhadap tindakan seperti itu memang ada diatur, tetapi karena masih lemahnya penegakan hukum dan praktik pengadilan (*judiciary*) maka efektivitasnya menjadi terbatas. Begitu juga halnya dengan sistem kepailitan dan pengadilan yang memiliki kelemahan telah membuat para kreditur hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap para debitur mereka.

2. Kendala budaya

Terdapat pandangan bahwa praktik *corporate governance* itu hanyalah suatu bentuk kepatuhan (*conformance*) terhadap peraturan atau ketentuan dan bukannya sebagai suatu sistem yang diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Hal ini mengakibatkan aplikasi *good corporate governance* tidak sepenuh hati dilaksanakan, sehingga efektivitasnya jadi berkurang. Telah membudayanya anggapan bahwa tindakan penyelewengan (*fraud*) maupun transaksi dengan orang dalam (*insider transactions*) hanyalah hal biasa dan lumrah dilakukan dan bahkan korupsi dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak salah. Anggapan ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip *corporate governance*, sehingga akan menghambat berjalannya praktik *good corporate governance*. Ditambah lagi dengan lemahnya praktik pengungkapan dan keterbukaan serta tidak efektifnya mekanisme pengungkapan dan kedisiplinan di pasar modal. Dalam beberapa kasus juga dijumpai fenomena bahwa para manajer dan direktur sangat kebal (*immune*) terhadap pertanggungjawaban kepada para stakeholder.

3. Kendala politik

Pengertian negara selalu menjadi kabur, terkadang diartikan sebagai pemerintah, tetapi juga ada yang mengartikannya sebagai lembaga negara yang lain. Hal ini ditambah lagi dengan kaburnya pemisah antara kepentingan bisnis dan kepentingan pemerintah maupun lembaga negara yang lain. Akibatnya berbagai keputusan bisnis di BUMN sangat diintervensi oleh pemerintah dan dalam kasus yang lain BUMN justru dieksploitasi oleh para politisi. Kondisi lain yang mungkin dapat menjadi perhatian ialah peranan lembaga pasar modal sebagai lembaga pengatur yang masih belum cukup kuat dalam menutupi kelemahan yang ada di pengadilan.

Teori *corporate governance*

1. Agency theory

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak principal. Pihak principal adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal. Teori agensi ini dapat membantu seorang auditor untuk memahami masalah yang terjadi antara agen dan principal.

2. Stakeholder theory

Dikatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan

suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Hubungan perusahaan dengan stakeholder di dalam perusahaan dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatannya yang membangun kerjasama dalam menciptakan kesinambungan usaha perusahaan, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan didasarkan pada hubungan yang bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan.

3. Stewardship theory

adanya persepsi bahwa utilitas yang dapat diperoleh dari orang yang berperilaku pro-organisasional akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bersikap individualistik dan berperilaku self-serving. Steward percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik. Dengan demikian kepentingan steward, motivasi untuk memperoleh utilitas ditujukan langsung ke organisasi dan tidak untuk tujuan personel.

4. Legitimacy theory

suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sosial yang lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya. Ketika suatu perbedaan yang nyata atau potensial, ada antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi.

C. Analisis Masalah Efektivitas Penerapan CG dan Kinerja Boards

Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma

Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul dengan overstated Unit penjualan, logistic sentral dan persediaan. Kasus ini bertentangan dengan prinsip dasar *corporate governance* yaitu accountability dan responsibility

Kasus penggunaan ulang alat swab antigen di bandara kualanamu

Para pelaku memproduksi, mendaur ulang stik untuk swab antigen. Stik ini oleh para pelaku,

dikumpulkan kemudian dicuci kembali, dibersihkan dengan cara mereka sendiri kemudian dikemas kembali, dan digunakan oleh para pelaku untuk melakukan tes swab di bandara Kualanamu," akibat dari kasus ini para pelaku dipecat dan semua direksi PT Kimia Farma diagnosa dipecat. Kasus ini bertentangan dengan prinsip independency

Hubungan kasus dengan teori *corporate governance*

1. Agency Theory

Kaitannya teori agensi ini dengan kasus manipulasi laporan keuangan ini adalah kasus ini mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan menjadi penilaian yang negatif terhadap kepemilikan di industri farmasi. Pada kasus ini, terlihat juga bahwa pihak yang diberi wewenang atas pengelolaan perusahaan (agent) malah melakukan sesuatu yang memaksimalkan kepentingannya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham sehingga hal ini memicu terjadinya masalah keagenan.

2. Stakeholder Theory

Kaitannya teori stakeholder ini dengan kasus manipulasi laporan keuangan Kimia Farma adalah kelompok stakeholder meliputi pemasok, pelanggan dan kelompok stakeholder lainnya yaitu calon investor, pemerintah, masyarakat umum dan lembaga regulator seperti OJK dan BEI merupakan stakeholders eksternal dari perusahaan. Sedangkan tenaga kerja dan kelompok stakeholder lainnya yaitu pemegang saham atau investor termasuk dalam stakeholder internal perusahaan dikarenakan berada di dalam lingkungan organisasi. Agar tercipta hubungan yang baik dengan kelompok stakeholder diperlukan peran public relations, investor relations, dan corporate secretary. Sasaran komunikasi bersama para stakeholder yang digunakan harusnya berbasis transparansi informasi. Namun pada kasus ini transparansi informasi yang ada masih belum dilakukan dengan tepat dan baik dari pihak manajemennya karena apabila kasus manipulasi laporan keuangan ini baru ditemukan dan angka yang ditemukan sangat besar membuktikan bahwa tata kelolanya tidak bersifat terbuka kepada para stakeholdernya.

3. Stewardship Theory

Pada kasus penggunaan kembali alat test antigen bekas PT Kimia Farma ini bertolak belakang dengan stewardship theory karena pegawai PT Kimia Farma melakukan kecurangan atau tindak kejahatan yaitu menggunakan kembali alat test antigen yang sudah dipakai. 5 orang tersangka melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang dimana tindakan itu lebih mengutamakan kepentingan pribadinya sehingga bertolak belakang dengan stewardship theory.

4. Legitimacy Theory

Kaitannya legitimacy theory dengan kasus penggunaan kembali alat test antigen bekas ini ialah kasus tersebut merugikan banyak masyarakat karena mereka memproduksi, mengedarkan dan menggunakan bahan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu. tindakan tersebut sangat merugikan banyak masyarakat yang sudah membayar untuk melakukan test antigen tetapi tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan tersebut yaitu bahwa PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. terbukti telah memanipulasi laporan keuangan dengan merubah nominal laba bersih perusahaan tersebut. PT. Kimia Farma memiliki total laba bersih sebesar 132 milyar dan ditemukan adanya fraud setelah diaudit yakni keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 milyar.

Selain itu, kasus lain yang merupakan masalah penerapan efektivitas *corporate governance* PT. Kimia Farma adalah adanya kasus penggunaan kembali alat test antigen bekas di Bandara Kualanamu. Petugas rapid test terbukti menggunakan kembali alat rapid test yang sebelumnya sudah pernah digunakan. Alat yang digunakan untuk rapid test didapatkan dalam keadaan bekas dan telah didaur ulang. Akibatnya 5 petugas rapid test dipecat dan direksi Kimia Farma Diagnostika dipecat.

Dalam kasus tersebut membuktikan bahwa dewan direksi tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG secara baik terutama dalam prinsip *accountability, responsibility, dan independency*. Hal tersebut dikarenakan PT. Kimia Farma menyeleweng dari peraturan yang ada dan tidak memiliki keteguhan sehingga dapat memanipulasi laporan keuangan dengan mengubah nominal laba bersih perusahaan.

Dalam hal ini membuktikan bahwa PT. Kimia Farma tidak terjamin termasuk dalam kategori independen menjadi tata kelola perusahaan lebih berintegritas berjalan dengan baik.

Saran

Dalam hal ini agar perusahaan menjadi lebih baik dalam hal penerapan GCG, PT Kimia Farma (Persero) Tbk harus melakukan pembenahan dalam aspek *good corporate governance* (GCG) dan mendorong implementasinya pada setiap lini bisnis yang ada di perusahaan. PT Kimia Farma seharusnya mengimplementasikan sistem-sistem terbaik yang ada sebagai bentuk upaya pencegahan penyelewengan tugas dan wewenang serta menjunjung nilai-nilai kejujuran, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan. PT Kimia Farma juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko manipulasi laporan keuangan agar dapat dengan segera dilakukan pengendalian dan tindakan untuk pembenahan sehingga perusahaan dapat menjalankan sistem dengan baik mampu mendorong percepatan proses transformasi yang dilakukan. Dengan diimplementasikannya prinsip-prinsip GCG tersebut, diharapkan pengelolaan sumber daya dan organisasi perusahaan menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif serta selalu berorientasi pada tujuan dan memperhatikan para pemangku kepentingan.

Referensi

- https://www.kimiafarma.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=252&lang=id
- <https://kimiafarmaapotek.co.id/sejarah/>
- https://www.kimiafarma.co.id/images/GCG/PEDOMAN_TATA_KELOLA%20PERUSAHAAN.pdf
- [https://www.kimiafarma.co.id/images/GCG/PEDOMAN_STANDAR_PRILAKU_\(COC\).pdf](https://www.kimiafarma.co.id/images/GCG/PEDOMAN_STANDAR_PRILAKU_(COC).pdf)
- <https://www.kimiafarma.co.id/index.php?lang=id>
- <https://media.neliti.com/media/publications/73688-ID-penerapan-good-corporate-governance-manf.pdf>
- <http://repo.darmajaya.ac.id/856/3/BAB%20II...pdf>
- <http://repository.unsada.ac.id/940/7/Bab%20II.pdf>
- <http://repo.darmajaya.ac.id/735/3/8.%20BAB%20II.pdf>
- https://www.academia.edu/28667439/Kasus_PT_Kimia_Farma
- <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/17/070500165/kasus-antigen-bekas-yang-berujung-pemecatan-seluruh-direksi-kimia-farma?page=all>